

Skripsi

by A. Triana

Submission date: 10-Dec-2025 06:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2842246543

File name: DAFTAR_SIDANG-1_organized.pdf (1.86M)

Word count: 10932

Character count: 72796

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dalam perekonomian, mengurangi beban biaya masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan nasional. Secara umum, subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk mengurangi harga barang atau jasa sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi harga, subsidi produksi, subsidi pajak, atau dalam bentuk bantuan langsung.

Dalam konteks ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, subsidi memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah sering kali memberikan subsidi pada sektor-sektor yang dianggap esensial bagi masyarakat luas, seperti energi (BBM dan listrik), pangan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan dasar mereka.

Di Indonesia, subsidi pupuk telah diatur secara nasional oleh Kementerian Pertanian melalui berbagai regulasi yang kemudian diturunkan ke tingkat daerah untuk pelaksanaan teknisnya. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kediri, memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan subsidi sangat bergantung pada efektivitas regulasi di tingkat daerah dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. (Kementerian Pertanian, 2021)

Salah satu bentuk subsidi yang strategis adalah subsidi di sektor pertanian, seperti subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian. Subsidi ini diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas petani, menekan biaya produksi, dan menjaga stabilitas harga pangan. Pupuk sebagai komponen penting dalam sistem produksi pertanian sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Namun, tingginya harga pupuk di pasaran seringkali menjadi hambatan utama bagi petani, terutama petani kecil, dalam meningkatkan produktivitas lahan mereka. Oleh karena itu, pemberian subsidi pupuk menjadi langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional. Penyediaan makanan, pakan ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada

keberhasilan program pembangunan pertanian. Pertanian memainkan ¹⁷ peran yang sangat strategis dalam mendukung ekonomi nasional, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, serapan tenaga kerja, dan membantu pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan ⁶¹ bagi masyarakat adalah tugas utama yang tidak mudah, terutama dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 yang diperkirakan mencapai 330,9 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat keenam di dunia setelah India. (Kementerian Pertanian, 2021)

Pangan adalah kebutuhan esensial ¹⁴ bagi manusia untuk mempertahankan hidup, oleh karena itu, ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap individu setiap saat adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan ¹⁴ realitas ini, isu pemenuhan kebutuhan pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi warganya, menjadikan ketahanan pangan isu sentral dalam pembangunan dan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. (Tahun, 2026)

¹⁷ Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, diperlukan berbagai sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Pupuk memiliki peran vital dalam meningkatkan produktivitas dan ²¹ kualitas hasil pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi ⁵¹ pupuk agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Peranan sektor pertanian dapat dipahami secara lebih ⁴ menyeluruh, di antaranya: (1) sebagai penyedia pangan masyarakat yang berfungsi strategis dalam menciptakan ketahanan pangan nasional (food security), (2) sektor pertanian memproduksi bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor industri dan jasa, (3) sektor pertanian berpotensi menghasilkan atau menghemat devisa dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian adalah pasar yang menjanjikan bagi produk-produk industri, dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal untuk ⁶⁹ pengembangan sektor-sektor lain (keluarannya adalah modal untuk investasi di sektor lain). (Muharjono & Zein Syarif. 2006).

²⁰ Peningkatan kinerja sektor pertanian bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi (saprodi) yang sangat memengaruhi hasil dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan

Pupuk di pasar, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun harga yang terjangkau, harus dijamin oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang dapat terjangkau oleh pengguna pupuk. Kebijakan inilah yang mendorong pemerintah untuk menerapkan subsidi pupuk bagi para petani. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan dan pendapatan mereka.

27 Pertanian adalah sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Peran sektor pertanian tidak hanya sebatas penyedia makanan, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 13,7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam Pembangunan Nasional. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian mencapai 13,45% dari PDB Indonesia, menjadikannya sebagai sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Sebagai negara yang bergerak dalam bidang agraris, Indonesia menempatkan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor pertanian. (Nadziroh, 2020)

Dalam era global yang terus berkembang, kebutuhan akan sumber daya pertanian setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Fenomena ini terjadi akibat fluktuasi cuaca yang tidak menentu, yang mengharuskan kegiatan pertanian atau perkebunan untuk mendapatkan pengolahan yang tepat. Salah satu aspek penting dari sumber daya pertanian yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Pupuk adalah salah satu bahan yang sangat diperlukan untuk tanaman, baik dalam pertanian maupun perkebunan. Pupuk memiliki berbagai keuntungan bagi tanaman, di antaranya dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif, memperkuat akar dan batang, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama atau penyakit. Seorang petani dapat memproduksi beras yang baik dengan menjaga kesuburan tanah, yang mana kombinasi pemupukan antara pupuk organik dan anorganik perlu dilakukan. Keuntungan dari penggabungan kedua jenis pupuk tersebut adalah mengatasi kekurangan dari masing-masing pupuk; pupuk anorganik membantu mengatasi sifat kurangnya pupuk organik, dan sebaliknya. Sebagai keperluan fundamental dalam pertanian, penggunaan pupuk masih dapat dihitung, namun dalam kondisi iklim yang tidak stabil, pupuk menjadi prioritas utama. Untuk memastikan ketersediaan pupuk, keterlibatan perusahaan produsen pupuk sangatlah penting guna memenuhi

permintaan para petani. Pupuk dibagi menjadi dua kategori berdasarkan distribusi dan pengadaannya, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. (Beno et al., 2022)

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang distribusi dan pengadaannya mendapatkan subsidi dari pemerintah demi kepentingan petani, berdasarkan program pemerintah menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Di sisi lain, pupuk non-subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan distribusinya tidak termasuk dalam program pemerintah dan tidak mendapatkan subsidi. Pupuk bersubsidi juga merupakan bantuan yang disediakan pemerintah kepada para petani guna mengurangi beban biaya produksi dan memastikan ketersediaan pupuk dengan harga di bawah harga pasar. Ini adalah salah satu inisiatif pemerintah dalam sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani. Keberadaan subsidi pupuk dari pemerintah sangat meringankan tugas petani dalam meningkatkan hasil pertanian, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. (Ibrahim, 2021)

Pupuk merupakan input yang sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaannya dan penggunaannya memiliki posisi strategis. Salah satu kebijakan menyangkut pengadaan pupuk adalah subsidi. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang menyertainya, seperti pengadaan, distribusi, dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam upaya untuk mengoptimalkan kebijakan ini, perlu dilakukan kajian terhadap program subsidi yang ada, dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Secara umum, terdapat dua aspek yang mempengaruhi petani dalam menentukan jenis dan jumlah pupuk yang diterapkan dalam usaha tani. Kedua aspek tersebut mencakup faktor teknis agronomis dan faktor sosial ekonomi (PSE, 1997). Faktor teknis agronomis meliputi: (1) jenis paket teknologi yang disarankan, (2) informasi teknologi dari sumber lain, (3) kemungkinan substitusi atau komplementaritas antar tipe pupuk, (4) pola tanam sepanjang tahun, dan (5) luas lahan yang dikelola. (Ibrahim, 2021)

Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani dalam penggunaan jenis dan jumlah pupuk, antara lain: (1) harga pupuk yang digunakan dalam budidaya, (2) harga pupuk jenis lainnya, (3) harga input lainnya, (4) harga hasil pertanian, dan (5) tingkat keuntungan dari usaha tani. Menurut Darwis dan Saptana (2010), permintaan pupuk dipengaruhi oleh harga pupuk, luas area tanam, dan dosis penggunaan pupuk. Begitu krusial dan strategisnya peran pupuk dalam

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, sehingga pemerintah terus mendorong pemanfaatan pupuk dengan meluncurkan beberapa kebijakan, termasuk subsidi pupuk. (34.11-Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2024.Pdf, 2023)

Pupuk adalah sarana produksi yang krusial dan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas komoditas pertanian. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang menyediakan unsur hara bagi tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, fisik, dan/atau biologis, serta merupakan produk industri pabrik pupuk. Pupuk berfungsi sebagai input produksi yang dapat mengoptimalkan hasil pertanian. Keterlibatan industri pupuk dalam perekonomian, khususnya pada sektor pertanian, tidak bisa diragukan lagi, terutama dengan semakin meluasnya area lahan pertanian dan kebun di Indonesia, yang semakin menambah kebutuhan akan pupuk. Permintaan pupuk yang terus melonjak mengharuskan peningkatan volume produksi pupuk. Posisi pupuk yang sangat krusial dalam proses produksi pertanian mendorong intervensi pemerintah untuk mengawasi perdagangan pupuk.

Sasaran utama dari kebijakan pertanian Indonesia adalah untuk memajukan sektor ini, meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi hasil produksi, serta meningkatkan taraf hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya sektor pertanian harus diakui karena perannya dalam ketahanan pangan. Berbagai langkah diambil oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan pangan, seperti pemberian subsidi input produksi, pengaturan harga, dan perbaikan lembaga pangan. Salah satu dari kebijakan subsidi tersebut adalah subsidi pupuk. Upaya untuk meningkatkan produksi pertanian memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana, termasuk pupuk yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Untuk itu, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta memastikan akses terhadap pupuk dengan harga terjangkau bagi petani yang memerlukannya. Ketersediaan pupuk, sebagai sarana produksi utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip ena tepat: tepat waktu, jumlah, jenis, lokasi, kualitas, dan harga. (Sujai Mahpud, 2023), (34.11-Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk- Bersubsidi-TA-2024.Pdf, 2023)

Dalam upaya mendukung peningkatan target produksi pertanian yang terus berkembang, Pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur dan sarana pertanian, termasuk subsidi pupuk di sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk adalah salah satu

langkah pemerintah untuk membantu petani mengakses kebutuhan pupuk pertanian dengan harga yang lebih ringan, sehingga diharapkan bisa mendorong peningkatan produksi pertanian demi ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

10

Dalam upaya intensifikasi, pemupukan berperan penting seiring dengan penggunaan bibit unggul yang perlu didukung dengan suplai hara yang memadai. Sementara itu, dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengembalikan produktivitas tanah di lahan yang sudah dikonversi. Efektivitas penggunaan pupuk ditujukan pada penerapan pemupukan yang seimbang dan berbasis organik, sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi serta standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan yang berimbang perlu didukung dengan aksesibilitas untuk memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Pupuk adalah komoditas penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional, dan pemerintah telah menyediakan subsidi untuk pengadaan dan distribusi beberapa jenis pupuk tertentu. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang diperoleh dan didistribusikan dengan bantuan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani berdasarkan program pemerintah. (Pokhrel, 2024)

Pupuk adalah salah satu elemen utama dalam produksi pertanian yang berkontribusi pada peningkatan kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Pupuk yang diberikan dalam dosis dan jenis yang tepat dapat memberikan hasil panen yang signifikan. Terdapat dua kategori pupuk yang umum digunakan dalam pertanian: pupuk organik, yang berasal dari bahan alami seperti kompos dan pupuk kandang, dan pupuk anorganik atau kimia, yang mengandung unsur hara yang lebih cepat terserap oleh tanaman. Subsidi pupuk dari pemerintah umumnya mencakup pupuk anorganik seperti urea, NPK, dan SP-36. Namun, akses yang terbatas terhadap pupuk bersubsidi sering menjadi kendala bagi petani. Tanpa mendapatkan cukup pupuk, hasil panen dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.

6

Dapat diketahui bahwa pupuk yang diproduksi dan beredar di pasaran sangat bervariasi, baik dari segi jenis, bentuk, ukuran, maupun kemasan. Hampir 90% pupuk tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, mulai dari makro hingga mikro. Jika tindakan pemupukan untuk menambah bahan-bahan yang kurang tidak dilakukan secara tepat, maka tanaman akan tumbuh dengan kurang optimal, seperti menguning, tergantung pada unsur yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan melalui berbagai kebijakannya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan

ketahanan pangan adalah melalui subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan dapat mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus pendapatan mereka. Kebijakan pemerintah mengenai hal ini adalah subsidi. Sejak tahun 1971, subsidi pupuk diterapkan untuk menekan biaya yang harus ditanggung petani dalam pengadaan pupuk, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk akibat biaya, dan untuk mendukung hal ini, perusahaan harus mendistribusikan pupuk kepada petani. (Ibrahim, 2021)

77 Secara umum, kebijakan pupuk subsidi adalah bentuk intervensi negara yang memiliki tujuan strategis, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong produksi pangan, menekan inflasi harga bahan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki dimensi keadilan sosial karena membantu kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak pasar. Namun, apabila implementasinya tidak tepat sasaran, maka tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai dan justru menimbulkan ketimpangan baru. Melihat pentingnya posisi kebijakan ini, maka perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaannya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: Apakah kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Apa saja kendala yang dihadapi di lapangan? Bagaimana persepsi petani terhadap kebijakan ini? Dan apa rekomendasi yang bisa diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini ke depan?

1 Kebijakan pemberian subsidi pupuk telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disiapkan cenderung semakin meningkat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah isu, seperti kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, peredaran pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi, serta antarwilayah. Meskipun memiliki tujuan mulia, kebijakan subsidi seringkali menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, mekanisme penyaluran subsidi yang tidak efisien, kurangnya pengawasan, serta lemahnya sistem pendataan juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara, distorsi pasar, dan ketimpangan sosial. (Kariyasa dan YUSDJA, 2005)

79 Evaluasi terhadap kebijakan subsidi, termasuk subsidi pupuk, menjadi sangat penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai

tujuannya. Evaluasi ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lanjutan, baik untuk penyempurnaan sistem penyaluran maupun formulasi skema subsidi agar lebih efisien dan berkeadilan. Efektivitas subsidi itu sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian pihak karena selama ini subsidi yang diberikan dianggap masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah banyak dikritisi karena dianggap hanya menguntungkan produsen, bukan petani sebagai penerima manfaat.

Masalah lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak perhatian adalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk, sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk saat musim tanam. Dalam kondisi ini, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan subsidi pupuk serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi agar efektif dan efisien. Kebijakan subsidi pupuk yang telah berlangsung lama ini memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian nasional serta petani. Subsidi ini diberlakukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membeli pupuk yang tepat sesuai rekomendasi pemupukan berimbang berdasarkan lokasi. Dengan adanya distribusi pupuk subsidi dari pemerintah, petani tidak perlu khawatir dalam menerapkan teknologi baru (jenis dan dosis pupuk) karena harga pupuk telah disubsidi (Susila, 2016).

Namun, dalam praktiknya banyak masalah yang muncul selama subsidi pupuk diterapkan, seperti kelangkaan pupuk, penyaluran pupuk yang diselundupkan ke luar negeri, dan harga yang melonjak di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) pada pupuk bersubsidi, mengganggu pasar nonsubsidi dan antar daerah. Selain itu, fenomena kelangkaan pupuk ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara usulan pupuk dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dan realisasinya. Kebijakan subsidi pupuk dinilai membawa dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani, khususnya dalam tanaman pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan HET untuk pupuk bersubsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi terbukti mampu memperluas areal panen dan meningkatkan produksi padi nasional. Namun, dari manfaat yang diberikan oleh subsidi pupuk bagi pertanian, pemerintah harus mengeluarkan biaya anggaran yang cukup besar untuk program subsidi tersebut. (Susila, 2010)

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, terkadang terdapat pihak-pihak yang berusaha melakukan penyimpangan dalam proses distribusi pupuk subsidi.

Maka dari itu, pemerintah berusaha mencegah terjadinya penyimpangan² yang sering dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi penyelewengan dalam pendistribusian pupuk subsidi dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani adalah dengan membuat pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Distribusi pupuk bersubsidi¹² ini menjadi salah satu program pemerintah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan program ini, diperluk¹² dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yang merinci kebutuhan masing-masing petani yang telah tergabung dalam suatu kelompok tani berdasarkan luas lahan yang dikerjakan. Kemudian, RDKK ini akan divalidasi oleh Departemen Pertanian setempat melalui penyuluh pertanian yang ditugaskan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan adanya RDKK ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi dapat mengenai target dengan tepat.

² Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang mencakup rincian sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian, dan pembagian kerja yang dilakukan secara musyawarah antar anggota kelompok tani dengan bimbingan Penyuluh, Petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD), dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan pu²k subsidi adalah terdaftar sebagai anggota kelompok tani di daerah tersebut. Petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi harus bergabung dal² kelompok tani, karena petani yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkannya. Setiap petani yang ingin membeli pupuk subsidi dari pengecer harus terdaftar² dalam kelompok tani, tidak terkecuali bagi petani dari kalangan bawah. Begitu pula, petani dari kalangan ekonomi atas yang memiliki sawah luas, jika terdaftar sebagai anggota kelompok tani tetap diperbolehkan mendapatkan pupuk subsidi. (Ummah, 2019a)

⁶ Kabupaten Kediri merupakan²⁵ salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai daerah agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan di wilayah ini. Oleh karena itu, kebijakan yang menyentuh langsung sektor pertanian menjadi sangat penting³ dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Di wilayah Kabupaten Kediri terdapat tujuh kios pupuk lengkap (KPL) yang melayani 62 Kelompok Tani (Poktan). Petani mengajukan RDKK untuk mendapatkan alo³asi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Terdapat empat hal

yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam peraturan baru tersebut. Pertama, petani yang tergabung ke dalam kelompok tani (Poktan) yang telah terdaftar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan atau perkebunan dengan lahan paling luas dua hektare per musim tanam. Kedua, pupuk subsidi diperuntukkan untuk sembilan komoditas pokok dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Keempat, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah.

Meskipun realisasi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Kediri tergolong tinggi, namun distribusinya masih belum merata. Data Dinas Pertanian Kabupaten Kediri tahun 2024 mencatat penyaluran pupuk Urea mencapai 93,3% dari alokasi (33.781 ton dari 36.207 ton), NPK mencapai 99,4% (40.461 ton dari 40.698 ton), sedangkan pupuk organik hanya tersalurkan sebesar 16,4% (1.103 ton dari 6.730 ton). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis pupuk dapat diakses petani secara seimbang. Selain itu, keterlambatan distribusi sering terjadi pada musim tanam, terutama di daerah pinggiran yang jauh dari kios resmi, sehingga banyak petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidaksesuaian antara data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan realisasi di lapangan, di mana ada petani berhak yang tidak mendapatkan alokasi, sementara pihak yang tidak berhak justru masuk daftar penerima. Kondisi distribusi yang belum merata ini menimbulkan ketidakadilan dan berimplikasi langsung pada kesejahteraan petani. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi atas implementasi Perbup No. 28 Tahun 2014 di Kabupaten Kediri, untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh petani.

29 Untuk mendukung aktivitas pertanian, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi. 31 Kebijakan ini merupakan turunan dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memberikan subsidi pupuk kepada petani guna menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa distribusi pupuk subsidi masih belum merata, dan ada sejumlah kasus di mana petani yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan pupuk subsidi sesuai alokasi.

Selain itu, terdapat persoalan dalam hal tata kelola pendistribusian, seperti keterlambatan distribusi, sistem alokasi yang tidak transparan, dan pengawasan yang lemah. Beberapa petani juga mengeluhkan adanya praktik-praktik penyimpangan dalam penyaluran, termasuk dugaan penimbunan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari sisi kebijakan, Perbup No. 28 Tahun 2014 menjadi instrumen yang krusial karena mengatur secara teknis bagaimana distribusi pupuk subsidi dilakukan di Kabupaten Kediri. Dalam peraturan ini, dijelaskan mekanisme mulai dari pengajuan kebutuhan pupuk oleh kelompok tani, proses verifikasi oleh penyuluh, hingga distribusi oleh distributor resmi. Namun, mekanisme ini tampaknya belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dari siklus kebijakan, di mana evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut **mencapai tujuan yang telah ditetapkan**. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi **hambatan-hambatan** yang muncul selama implementasi, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Dalam konteks Perbup No. 28 Tahun 2014, evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas penyaluran pupuk subsidi sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap sektor pertanian.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya sosialisasi kepada petani mengenai mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak petani yang belum memahami tata cara pengajuan, sehingga mereka tidak terdaftar dalam sistem alokasi. Di sisi lain, data kelompok tani dan lahan garapan yang digunakan sebagai dasar alokasi pupuk juga sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui, menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi yang tersedia. Distribusi pupuk subsidi juga dihadapkan pada tantangan geografis, terutama bagi petani yang tinggal di **daerah terpencil**. Akses terhadap distributor resmi menjadi hambatan tersendiri, karena **jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi**. Dalam beberapa kasus, petani akhirnya **membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal** karena **tidak sempat mengakses pupuk subsidi tepat waktu**. Kondisi ini tentu **bertolak belakang dengan semangat** dari kebijakan subsidi itu sendiri.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kediri seharusnya memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi. Pengawasan terhadap distributor, verifikasi data petani, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perbup seharusnya menjadi bagian dari upaya memperbaiki

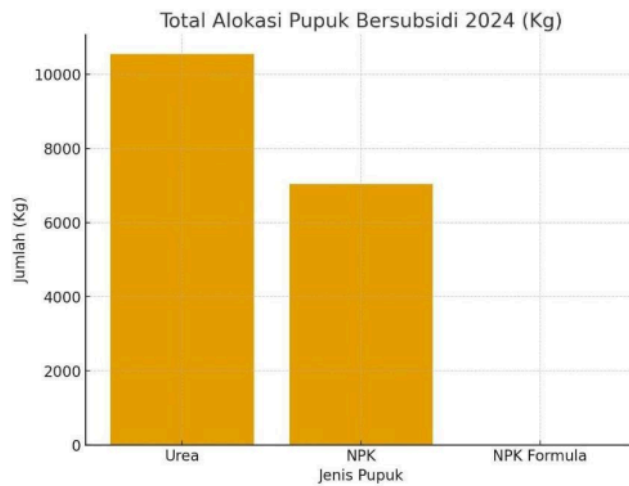
kualitas pelayanan kepada petani. Namun, dalam kenyataannya, koordinasi antarinstitusi dan pelibatan pemangku kepentingan lokal masih lemah. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik di lapangan.

Desa Ketawang merupakan salah satu ⁴⁷desa di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa ini termasuk dalam wilayah pertanian yang memiliki potensi cukup besar sebagai penyangga produksi komoditas pertanian seperti jagung, padi, dan hortikultura lainnya. Desa ini dibentuk sebagai unit pemerintahan desa dalam sistem administrasi Kabupaten karena berada di wilayah pedesaan, penduduk Desa Ketawang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja di sektor agrikultural.

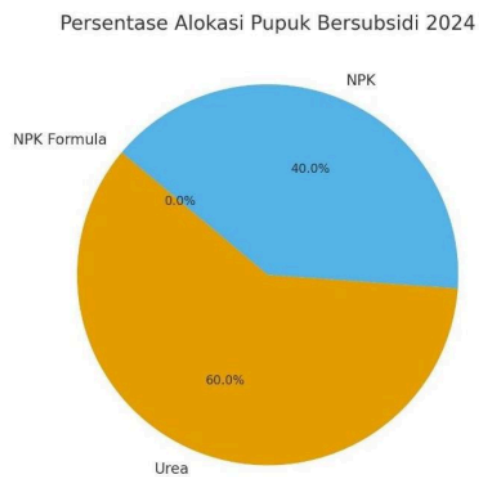
Pertanian menjadi sektor utama perekonomian Desa Ketawang. Luas lahan tanam relatif cukup terhadap kebutuhan tani jagung dan komoditas lainnya. Petani di Ketawang termasuk dalam kelompok tani yang memanfaatkan pupuk bersubsidi dan pupuk organik. Ada kepedulian terhadap praktek pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti aktivitas organik yang dijalankan oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Ada ketergantungan terhadap pupuk kimia dan subsidi pemerintah untuk mendukung produktivitas. Distribusi pupuk bersubsidi menjadi hal penting bagi petani agar produksi tetap optimal.

Salah satu persoalannya adalah distribusi pupuk yang belum seimbang antar jenis. Berdasarkan data 2024, alokasi pupuk bersubsidi lebih besar untuk Urea dibandingkan NPK, dan NPK Formula tidak dialokasikan sama sekali. Ketergantungan pada pupuk jenis tertentu (seperti Urea) bisa menimbulkan masalah jangka panjang pada kesuburan tanah jika unsur hara lainnya seperti fosfor dan kalium kurang diperhatikan. Ketersediaan sarana dan pendampingan pertanian yang mendukung praktek pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk formula masih terbatas. Fluktuasi harga, kemampuan ekonomi petani, dan akses informasi juga turut memengaruhi bagaimana pupuk dialokasikan dan digunakan secara efektif.

Desa Ketawang memiliki peran penting sebagai daerah produsen pertanian di Purwoasri, sehingga efektivitas distribusi pupuk bersubsidi sangat mempengaruhi produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani. Kebijakan subsidi pupuk harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik lokal agar distribusi lebih adil dan sesuai ketersediaan lahan serta kondisi tanah. Perhatian pada pemupukan berimbang penting agar keberlanjutan produksi dan kualitas tanah tetap terjaga, tidak hanya fokus dalam jangka pendek.



Gambar 1. 1 Total Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 (Kg)



Gambar 1. 2 Persentase Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024

6 Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk komoditas jagung di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, tercatat rencana tanam seluas 80,04 hektar dengan alokasi pupuk sebagai berikut: Urea 10.547 Kg, NPK 7.042 Kg, dan NPK Formula 0 Kg. Distribusi ini menunjukkan bahwa kebutuhan

pupuk petani sebagian besar masih bertumpu pada Urea (60%), diikuti oleh NPK (40%), sedangkan NPK Formula tidak mendapat alokasi sama sekali. Distribusi pupuk menunjukkan bahwa Urea mendominasi alokasi karena perannya penting dalam menunjang pertumbuhan vegetatif jagung. NPK tetap diberikan dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung fase generatif tanaman. Sedangkan NPK Formula tidak dialokasikan pada periode ini. Dengan luas rencana tanam 80,04 hektar, kebijakan distribusi ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan nitrogen (Urea) dibandingkan pemupukan berimbang.

Kondisi tersebut memunculkan beberapa permasalahan. Pertama, dominasi alokasi Urea menunjukkan adanya ketergantungan tinggi petani terhadap pupuk nitrogen, padahal pemupukan berimbang seharusnya juga memperhatikan unsur hara lain untuk menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Kedua, tidak adanya alokasi NPK Formula dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk yang lebih variatif, sehingga efektivitas pemupukan berimbang bisa terganggu. Ketiga, kebijakan distribusi yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek (pertumbuhan vegetatif) berpotensi mengabaikan aspek keberlanjutan produktivitas lahan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya terkait dengan proporsi distribusi antarjenis pupuk. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa subsidi pupuk benar-benar efektif dalam mendukung produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian di masa depan. Kebijakan publik dapat dievaluasi menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini memungkinkan peneliti untuk melihat latar belakang atau konteks kebijakan, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, serta hasil atau dampak dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan model CIPP, evaluasi terhadap Perbup No. 28 Tahun 2014 dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi Kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sebagai upaya membantu sector pertanian di Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengevaluasi Kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sebagai upaya membantu sector pertanian di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini untuk penelitian ⁸ori evaluasi yang digunakan pada kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan seperti, Dinas Pertanian, peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Kediri diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan didalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Manfaat secara Praktis, biasanya penelitian ini digunakan untuk penyelesaian pada suatu instansi yang membutuhkan gambaran pelaksanaan kartu tani di lapangan ⁸ seperti, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Selanjutnya dengan mengetahui pelaksanaan program kartu tani tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan dan kebijakan pendistribusian pada bidang pertanian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian



Gambar 4. 1 Kios Pupuk Bersubsidi di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas utama di wilayah ini antara lain padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri (2024), Desa Ketawang memiliki luas lahan pertanian sekitar 80,04 hektar, dengan total alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 10.547 kg (60%), NPK sebanyak 7.042 kg (40%), dan NPK formula 0 kg.

Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik dan dinamika yang menarik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi, khususnya terkait ketidaksesuaian antara data RDKK dan realisasi lapangan, serta permasalahan keterlambatan distribusi pupuk yang sering terjadi saat musim tanam. Pelaksanaan kebijakan di desa ini melibatkan berbagai pihak, yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri sebagai pelaksana teknis kebijakan,
2. Distributor dan pengecer pupuk sebagai penyalur di tingkat wilayah,
3. Gapoktan dan kelompok tani sebagai penerima manfaat utama,

4. Penyuluh pertanian sebagai pendamping penyusunan RDKK dan pelaksanaan distribusi di lapangan.

Secara umum, Desa K⁵⁴awang memiliki struktur kelembagaan pertanian yang cukup aktif dengan adanya Gabungan K³⁹ompok Tani (Gapoktan) dan beberapa Kelompok Tani (Poktan) yang se⁵⁷a rutin menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun, implementasi kebijakan subsidi pupuk masih menghadapi kendala pada aspek pendataan, pemerataan distribusi, dan pengawasan.

4.1.2 Penyajian Data

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima kategori informan sesuai pedoman, yaitu pejabat/staf Dinas Pertanian, ketua Gapoktan, anggota kelompok tani, distributor/pengecer pupuk bersubsidi, serta pe⁶⁵enerima dan non-penerima pupuk. Data disajikan dan dikelompokkan sesuai model CIPP (Context, Input, Process, Product) :

A. Komponen Context (Konteks)

Konteks penelitian menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya Perbup No. 28 Tahun 2014, serta relevansinya terhadap kebutuhan petani di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat⁸⁰ Dinas Pertanian, Perbup No. 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk mengatur tata cara penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Sebelum adanya kebijakan ini, banyak keluhan dari petani mengenai kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi, serta penyaluran yang tidak merata. *“Dulu sebelum ada peraturan bupati, distribusi pupuk sering tidak jelas. Ada petani yang dapat lebih, ada yang malah tidak kebagian. Sekarang dengan RDKK, semuanya harus terdata,”* (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas menyampaikan bahwa sebelum diberlakukannya Perbup, distribusi pupuk tidak terkoordinasi dengan baik, sering terjadi kekurangan stok, dan penyaluran tidak terdokumentasi dengan jelas. Banyak aduan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk pada musim tanam. *“Sebelum ada RDKK yang ketat, banyak data yang tidak sesuai kondisi lapangan. Ada petani yang kebutuhannya kecil tapi dapat banyak, sebaliknya yang butuh banyak malah kurang.”* (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas juga menilai kebijakan ini masih sangat relevan, terutama karena sektor pertanian di Kabupaten Kediri bergantung pada ketersediaan pupuk yang tepat

waktu dan terjangkau. Mekanisme RDKK dinilai mampu memperjelas kebutuhan pupuk per kecamatan dan desa.

Permasalahan utama yang mendasari kebijakan adalah ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, distribusi yang tidak merata, hingga potensi penyimpangan pupuk bersubsidi di lapangan. *“Dulu itu pengawasannya kurang. Ada saja pengecer yang nakal, menjual ke yang bukan penerima. Dengan Perbup ini kita bisa menindak dan memperketat aturan.”* (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Ketua Gapoktan Desa Ketawang menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan prosedur bagi kelompok tani, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan atau ketidaktepatan jumlah pupuk. *“Perbup ini bagus sebenarnya, karena menertibkan data. Tapi kadang realisasinya tidak sesuai, yang diminta 100 zak kadang datang 70 saja,”* (Ketua Gapoktan Ketawang). Kelompok tani menilai kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan petani karena pupuk merupakan input produksi utama. Mereka merasakan manfaat dari sistem RDKK yang membuat pembagian lebih tertib.

Menurut Ketua Gapoktan, sebelum kebijakan diberlakukan, distribusi pupuk sering terlambat dan tidak terstruktur. Petani sering berebut pupuk ketika stok datang dan tidak ada acuan kuota yang jelas. Ketua Gapoktan menyebutkan bahwa manfaat yang paling dirasakan adalah distribusi yang lebih terkontrol, adanya kepastian alokasi, serta kemudahan dalam mengatur kebutuhan pupuk anggota. *“Sekarang kami punya data jelas lewat RDKK. Jadi kami bisa mengatur siapa dapat berapa.”* (Ketua Gapoktan Ketawang).

Menurut anggota kelompok tani, kebijakan ⁶³ pupuk bersubsidi sangat membantu kebutuhan petani, terutama dalam menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha tani. Mereka merasa bahwa ketersediaan pupuk subsidi yang diatur melalui RDKK membuat distribusi lebih jelas. Sebelum kebijakan ini, petani sering kesulitan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Ketersediaan pupuk tidak menentu dan mempengaruhi hasil panen mereka. *“Dulu pupuk sering langka, Mbak. Kalau pun ada harganya mahal. Kadang kami harus kurangi pemakaian.”* (Anggota Kelompok Tani). Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu karena menekan biaya produksi dan memperbaiki ketersediaan pupuk. Meski demikian, kuota sering kali belum memenuhi total kebutuhan lahan. *“Sekarang lebih enak. Pupuknya ada meskipun kadang kurang jumlahnya. Tapi setidaknya ada pegangan.”* (Anggota Kelompok Tani).

Para petani mengakui bahwa mereka sangat bergantung pada pupuk subsidi. Tanpa subsidi, biaya operasional meningkat signifikan sehingga berdampak pada keuntungan. *“Kalau beli pupuk nonsubsidi, aduh... berat di ongkos. Bisa rugi kalau hasil panen tidak tinggi.”* (Anggota Kelompok Tani).

Selanjutnya Distributor juga menyampaikan bahwa mereka memahami ⁷⁶ dengan baik kebijakan pupuk bersubsidi, terutama ketentuan yang mengatur bahwa pupuk hanya boleh disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam RDKK. Mereka memahami bahwa tugas utama distributor adalah memastikan pupuk disalurkan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan menjaga agar tidak terjadi penyelewengan. Beberapa distributor telah terlibat sejak awal penerapan Perbup, dan mereka merasakan perubahan sistem menjadi lebih tertata dengan adanya pembagian alokasi dan jadwal distribusi yang jelas. *“Sejak 2014 kami sudah ikut menyalurkan pupuk sesuai regulasi ini.”* (Distributor Pupuk).

Kebijakan ini membuat sistem kerja distributor lebih ketat dan administratif. Ada peningkatan beban pencatatan, namun distribusi menjadi lebih transparan dan dapat dipantau. *“Sekarang harus banyak catatan, laporan, dan pengecekan. Lebih rumit tapi lebih aman.”* (Distributor Pupuk). Namun, ada juga kendala yang sering dihadapi distributor antara lain keterlambatan pasokan dari produsen, ketidaksesuaian RDKK, permintaan petani yang lebih tinggi dari kuota, serta kendala transportasi.

Tabel 4. 1 Daftar Harga Pupuk

Kategori	Jenis Pupuk	Harga
Subsidi	Urea	112.000
Subsidi	NPK	115.000
Subsidi	Phonska	115.000
Non-subsidi	Urea	250.000
Non-subsidi	NPK	250.000
Non-subsidi	Phonska	250.000

Dari sisi petani, sebagian besar menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi membantu meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani kecil. Namun, petani non-penerima menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya adil, karena masih ada petani yang memiliki lahan kecil tetapi tidak terdaftar dalam RDKK.

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Poktan : Suka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	NIM	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS OPERASI	KETERANGAN RT 1	KETERANGAN RT 2	KETERANGAN RT 3	TANDA TANGAN
23	WANDONO	709615170900002	Kediri	1962-09-17	Jl. MANGGA RT.2 RW.4 DESA KETAWANG	0.66					
24	WICAKA	709615160900002	KEDIRI	1968-09-11	Jl. MANGGA RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.08					
25	WICAKSE WISHTA	709615161900002	KEDIRI	1965-09-05	DKN PEDHARTO	0.35					
26	WIDYONO WISNOYO	709615170900002	KEDIRI	1967-07-11	Jl. KARUTAN RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.07					
27	WIL MUYMAN	709615190900002	Kediri	1962-05-19	DKN PEDHARTO RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.06					
28	WILSON RUSDI	709615180900002	KEDIRI	1968-09-08	RT 06 RW 01 DESA BLANG	0.05					
29	WITOMAR	709615161900002	KEDIRI	1969-09-28	KETAWANG	0.21					
30	WISMAN	709615090900002	Kediri	1967-06-08	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.4					
31	WISNI	709615091600002	KEDIRI	1967-01-03	Jl. MANGGA RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.21					
32	WISARTO	709615061500002	Kediri	1957-11-06	DKN PEDHARTO RT.4 RW.3 DESA KETAWANG	0.14					
33	WISNI	709615161900002	KEDIRI	1961-07-01	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.14					
34	WISARTO	709615060600002	Kediri	1962-06-06	Jl. SUNDI RT.1 RW.3 DESA KETAWANG	0.14					
35	WISARTO	709615060600002	KEDIRI	1960-06-05	RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	1					
36	WISAKA	709615070100002	Kediri	1961-07-01	Jl. MANGGA DKN PEDHARTO RT.3 RW.4 DESA K	0.14					
37	WISAKA	709615070500002	KEDIRI	1959-06-16	KETAWANG	0.32					
38	WISARTONO	709615161500002	KEDIRI	1956-05-06	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	2					
39	WISARTON	709615070500002	KEDIRI	1956-07-01	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.21					
40	WISARTONO	709615060600002	KEDIRI	1966-09-08	BLAUWE WETAN	0.14					
41	WISARTON	709615160600002	KEDIRI	1963-05-16	Jl. JERUK RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	1.42					
42	WISARTO WISNOYO	709615161600002	KEDIRI	1966-05-11	Jl. MANGGA RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	2					
43	WISARTO	709615070500002	KEDIRI	1952-07-01	Jl. MANGGA RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.14					
44	WISARTONO	709615070500002	KEDIRI	1965-12-19	DK KETAWANG	0.28					

Formulir RDKK 2025

Page 2 of 10

Kecamatan Purwoasri - Kab. Kediri

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Poktan : Suka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	NIM	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS OPERASI	KETERANGAN RT 1	KETERANGAN RT 2	KETERANGAN RT 3	TANDA TANGAN
45	BATIRAN	709615010700002	KEDIRI	1962-07-01	DKN PEDHARTO RT.2 RW.3 DESA KETAWANG	0.7					
46	BHUSIL ANWAR	709615060700002	KEDIRI	1977-06-29	DKN PEDHARTO RT.2 RW.3 DESA KETAWANG	0.16					
47	BHUSIL MARDIYO	709615220900002	Kediri	1999-03-22	Jl. MANGGA RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.05					
48	ELIJAH HIDAYAT	709615160100002	KEDIRI	1973-03-08	Jl. MANGGA RT.1 RW.3 DESA KETAWANG	0.21					
49	NARUDONO	709615140300002	KEDIRI	1961-03-24	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.05					
50	NARUDONO	709615111900002	KEDIRI	1959-11-11	Jl. KELAPA RT.2 RW.3 DESA KETAWANG	1.65		PADI	PADI	JERING	
51	NARUDAS	709615150300002	KEDIRI	1979-03-15	Jl. MANGGA RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.71					
52	NARUDIN	709615160500002	KEDIRI	1966-05-16	RT.3 RW.2 DL BLAUWE	1.7					
53	NAT SARDI	709615010700002	Kediri	1959-07-01	DKN PEDHARTO RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.38					
54	NELAN SETYA RUSI	709615221000002	Kediri	1963-10-22	Jl. KARUTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.32					
55	NISYANI	709615160700002	KEDIRI	1960-07-25	DKN PEDHARTO	0.5					
56	NISIL LIZAN SYISIR	709615251200002	PURWODUGO	1975-12-24	RT 03 RW 01 DESA JANTON	0.6					
57	NISIL NISIRHARTIYUS	709615290600002	KEDIRI	1966-09-29	DKN PEDHARTO RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.21					
58	NISIL YUSUF	709615100600002	KEDIRI	1976-06-19	Jl. KELAPA RT.2 RW.3 DESA KETAWANG	2					
59	NISIRANTO	709615121100002	KEDIRI	1976-11-12	Jl. KELAPA RT.2 RW.3 DESA KETAWANG	0.32					
60	NISIRKATI	709615140400002	KEDIRI	1963-04-14	Jl. DALAM RT.2 RW.2 DESA KETAWANG	0.14					
61	NISILZEN	709615140300002	KEDIRI	1969-03-11	DKN MOLOUTU RT.1 RW.4 DL BELOR	0.57					
62	NISITATON	709615160500002	KEDIRI	1963-05-08	DKN PEDHARTO	0.32					
63	NISIRKATI	709615140400002	KEDIRI	1966-08-24	KETAWANG	0.21					
64	NISIRKILIDAN	709615160400002	KEDIRI	1966-09-08	DKN PEDHARTO RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.21					
65	NISIRKILIDAN	709615070700002	KEDIRI	1968-07-09	KETAWANG	0.66					
66	NIWIPY	709615070700002	KEDIRI	1966-07-01	Jl. DALAM DKN PEDHARTO RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.22					

Formulir RDKK 2025

Page 3 of 10

Kecamatan Purwoasri - Kab. Kediri

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Pukutan : Duka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	KIR	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS UPJAYA	KELOMPOK RT	KELOMPOK RW	KELOMPOK DESA	TANDA TANGAN
47	PAWITING	750615018790999	KEDIRI	1965-07-01	S. BARUTAN RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
48	PAWITING	750615120773002	KEDIRI	1975-07-12	DE KETAWANG	0.42					
49	PAWITING	750615019074000	Kediri	1966-07-01	S. BARUTAN RT 2 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
70	PONDIAN	750615019165099	KEDIRI	1965-07-01	S. MAROGI RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0.32					
71	PONDIAN	75061501918510001	KEDIRI	1965-10-01	SD KILAU RT 1 RW 1 DESA BALUR	0.14					
72	BARISAN	750615019169077	KEDIRI	1965-07-01	S. BARUTAN RT 1 RW 4 DESA KETAWANG	0.21					
73	REKARTO	7506151004010003	KEDIRI	1965-04-18	SD PJONARTO RT 3 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
74	REKARTO	750615050472003	KEDIRI	1975-06-01	S. KELAPA RT 1 RW 3 DESA KETAWANG	0.14					
75	REKARTO	7506150197600135	KEDIRI	1968-07-01	S. SAWO RT 1 RW 3 DESA KETAWANG	0.42					
76	SABAR	7506150411800002	KEDIRI	1963-11-04	SD PJONARTO	0.14					
77	SABAR	7506151209000001	KEDIRI	1969-09-23	S. SERIK RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	1.03					
78	SABAR	7506141701650001	KEDIRI	1965-05-17	SD PONDJAJ RT 1 RW 1 DESA PONDJAJ	1.28					
79	SABAR	7506151009000003	KEDIRI	1969-09-16	SD PJONARTO RT 3 RW 4 DESA KETAWANG	0.32					
80	SABAR	7506150417010003	KEDIRI	1963-03-17	DE KETAWANG	0.42					
81	SABAR	7506150407750002	KEDIRI	1977-07-04	DE KETAWANG	0.71					
82	SABAR	7506151076301008	KEDIRI	1963-07-01	SD PJONARTO RT 4 RW 3 DESA KETAWANG	0.14					
83	SABAR	7506150197650142	KEDIRI	1965-07-01	S. SERIK RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	0.14	0.21				
84	SABAR	7506151076900103	KEDIRI	1969-07-01	DE KETAWANG	0.14					
85	STI MUDARIPAN	750615307730002	BOJONEGORO	1975-07-13	SD PJONARTO RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.38					
86	SLAMET	750615060740003	KEDIRI	1974-06-06	S. SAWO RT 1 RW 3 DESA KETAWANG	0.14					
87	SOLIKIN	750615170003000	KEDIRI	1965-08-17	S. BARUTAN RT 3 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
88	SUDARAB	750615019760006	Kediri	1969-07-01	SD PJONARTO RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	0.25					

CHATI NAKA

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Pukutan : Duka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	KIR	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS UPJAYA	KELOMPOK RT	KELOMPOK RW	KELOMPOK DESA	TANDA TANGAN
89	WIDAROGRO	7506151009000001	KEDIRI	1969-09-28	SD PJONARTO RT 3 RW 4 DESA KETAWANG	0.21					
90	WIDAROGRO	7506150504700003	KEDIRI	1963-02-25	S. SALAM RT 2 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
91	WIDAROGRO	750615019074000	Kediri	1966-07-01	S. MAROGI RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0.32					
92	WIDAROGRO	750615019165099	KEDIRI	1975-04-01	S. MAROGI RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.18					
93	WIDAROGRO	7506150191770002	KEDIRI	1977-02-02	DE KETAWANG	0.32					
94	WIDAROGRO	750615019165099	KEDIRI	1968-06-10	DE KETAWANG	0.39					
95	WIDAROGRO	750615019165099	KEDIRI	1968-06-10	SD PJONARTO RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.39					
96	WIDAROGRO	7506150404600002	KEDIRI	1966-04-04	S. SAWO RT 1 RW 3 DESA KETAWANG	1					
97	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1965-07-01	S. BARUTAN RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0.14					
98	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1965-07-01	SD PJONARTO RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0.53					
99	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1965-07-01	S. SAWO RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0.35					
100	WIDAROGRO	7506151209000001	KEDIRI	1969-09-23	DE KETAWANG RT 2 RW 3	0.14					
101	WIDAROGRO	7506141712000008	Kediri	1966-12-31	DESA PAPA	0.35					
102	WIDAROGRO	7506150404600002	KEDIRI	1966-04-04	DE KETAWANG	0.42					
103	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1965-07-01	S. SERIK RT 3 RW 4 DESA KETAWANG	0.71					
104	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1974-10-27	RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	0.35					
105	WIDAROGRO	7506151209000001	KEDIRI	1969-09-23	DE KETAWANG	0.29					
106	WIDAROGRO	7506151209000001	KEDIRI	1977-06-12	SD PJONARTO	0.14					
107	WIDAROGRO	7506150197650142	Kediri	1965-07-01	S. SAWO RT 4 RW 3 DESA KETAWANG	0.85					
108	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1968-03-12	S. MAROGI RT 3 RW 3 DESA KETAWANG	0					
109	WIDAROGRO	7506150197650142	KEDIRI	1965-03-07	SD WATES RT 2 RW 3 DESA KAPAS	0.17					
110	WIDAROGRO	750615111800006	KEDIRI	1963-11-01	S. KELAPA RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	0.14					

MEKINGAL

MEKINGAL

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Poktan : Suka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS PERSEGI	KELOMPOK RT	KELOMPOK RW	KELOMPOK DESA	TANGGA TANGAN
131	DIWARTI	'5006154107440114	KEDIRI	1966-07-01	KETAWANG	0.85	0,64				
132	DIWAZER	'5006153011760093	KEDIRI	1979-12-28	S. MANGGA RT.6 RW.4 DESA KETAWANG	0.85					
133	DIWABDI	'5006151807770002	KEDIRI	1977-07-18	DK. PUJOMARTO RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.14					
134	DIWARTI	'5006154707740003	KEDIRI	1976-07-07	KETAWANG	0.35					
135	DIWARTI	'5006154305060002	KEDIRI	1968-03-02	DK. PUJOMARTO	0.14					
136	DIWARTI	'5006154107610107	KEDIRI	1963-07-01	S. MANGGA RT. 3 RW.2 DESA KETAWANG	0.71					
137	DIWABDI	'5006150505060003	KEDIRI	1969-05-05	S. KARESTAN RT.2 RW.4 DESA KETAWANG	0.21					
138	DIWAB	'5006151005070005	KEDIRI	1959-05-10	S. APUL RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	2					
139	DIWABDI	'5006150105030061	KEDIRI	1962-07-01	DK. GEDANGAN RT.2 RW.2 DESA BELUK	0.18					

**FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026**



Nama Poktan : Suka Karya Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS PERSEGI	KELOMPOK RT	KELOMPOK RW	KELOMPOK DESA	TANGGA TANGAN
130	DIWABDI	'5006150709000002	KEDIRI	1958-09-07	S. MANGGA RT.1 RW.4 DESA KETAWANG	0.78					
131	DIWABDI	'5006151006430001	Kediri	1942-08-28	DK. PUJOMARTO RT.5 RW.4 DESA KETAWANG	0.4					
132	DIWABDI	'5006151506720003	KEDIRI	1972-06-15	S. SALAK DK. PUJOMARTO RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	1.57					
133	DIWABDI	'5006150506060002	KEDIRI	1966-06-05	DK. PUJOMARTO RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.64					
134	DIWABDI	'5006150107430060	KEDIRI	1943-07-01	S. JAMBU RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.57					
135	DIWABDI	'5006150207610140	KEDIRI	1945-07-01	S. KARESTAN RT.3 RW.4 DESA KETAWANG	0.71					
136	DIWARTYANTO	'5006150201805003	KEDIRI	1965-01-02	S. KARESTAN RT.4 RW.4 DESA KETAWANG	0.14					
137	DIWABDI	'5006150107700009	KEDIRI	1979-07-05	S. BIRUK RT.1 RW.3 DK. KETAWANG	1.14					
138	DIWOTO	'5006151005400002	KEDIRI	1968-05-10	S. MANGGA RT.5 RW.3 DESA KETAWANG	0.9					
139	DIWABDI	'5006150107420101	KEDIRI	1942-07-01	S. KARESTAN RT.2 RW.4 DESA KETAWANG	0.57					
140	DIWABDI	'5006151107000005	KEDIRI	1978-10-11	S. MANGGA RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.71					
141	DIWOTO	'5006151006440001	KEDIRI	1964-06-28	DK. PUJOMARTO RT.2 RW.4 DESA KETAWANG	0.5					
142	DIWABDI	'5006151005000002	KEDIRI	1959-08-01	S. MANGGA RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.42					
143	DIWABDI	'5006151212700003	KEDIRI	1977-12-22	S. MANGGA RT.1 RW.4 DESA KETAWANG	1.62					
144	DIWABDI	'5006151006430002	KEDIRI	1942-08-05	S. MANGGA DK. PUJOMARTO RT.1 RW.4 DESA KETAWANG	0.24					
145	DIWABDI	'5006151017901211	KEDIRI	1959-07-01	S. MANGGA RT.3 RW.3 DK. KETAWANG	0.42					
146	DIWABDI	'5006151311890001	KEDIRI	1959-03-10	KETAWANG	0.56					
147	DIWABDI	'5006150905090000	KEDIRI	1959-11-04	S. JAMBU RT.3 RW.3 DESA KETAWANG	0.64					
148	DIWABDI	'5006151006450004	KEDIRI	1965-06-25	S. APUL RT.4 RW.3 DESA KETAWANG	0.17					
149	DIWABDI	'5006154107610106	Kediri	1966-07-01	DK. PUJOMARTO RT.1 RW.4 DESA KETAWANG	0.14					

MENINGGAL

FORMULIR PENGAJUAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PENGAJUAN 2026

Logo: 

Nama Poktan : Sula Harys Mulya Abadi
Desa : Ketawang

NO	NAMA PETANI	KIR	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LUAS LAHAN	LUAS LUGAT	KEMERDIAAN BT	KEMERDIAAN BT	KEMERDIAAN BT	TAMBA TANGAN
140	BOYOND	70061220170001	KEDIRI	1975-01-23	Desa. PUGUHARTO RT 4 RW 3 DESA KETAWANG	0.18					
141	THE WATYEN ARDIANSARI	70061220080002	KEDIRI	1984-06-22	Desa. KETAWANG RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.87					
142	IMBUTIN	7006122009010002	KEDIRI	1983-06-29	KETAWANG	0.20					
143	WANI PURNAMA	7006122111000004	KEDIRI	1983-11-05	Desa. KALAPA DESA. PUGUHARTO RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	2					
144	WAGUHARTO	7006122107000007	KEDIRI	1968-07-01	Desa. WATES RT 1 RW 3 DESA SAPTA KEL. KEDIRI	0.50	0,71				
145	YULIN	7006122004020004	KEDIRI	1959-02-02	Desa. KALAPA RT 2 RW 3 DESA KETAWANG	0.5					
146	YATINI	7006122003030001	KEDIRI	1963-03-24	Desa. PUGUHARTO RT 4 RW 4 DESA KETAWANG	0.14					
147	YUDA SARIKANTO	7006122006090001	KEDIRI	1989-09-09	Desa. KETAWANG	0.32					
148	YUDI THE PRAGETTY	700612210407000002	KEDIRI	1993-02-24	Desa. KALAPA RT 1 RW 3 DESA KALAPA KEDIRI	1.53					
149	YULIANI	7006122107000005	KEDIRI	1968-06-17	Desa. KALAPA RT 1 RW 3 DESA KETAWANG	0.32					
TOTAL						8.71	0				

Formulir RDKK 2025 Page 8 of 10 Kecamatan Purwoasri - Kab. Kediri

Gambar 4. 2 Data RDKK Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri

Pihak Dinas menjelaskan bahwa perencanaan distribusi pupuk subsidi dimulai dari penyusunan RDKK oleh kelompok tani. Proses ini dianggap sebagai bagian paling krusial karena menentukan jumlah kebutuhan pupuk tiap desa. Mereka menjelaskan bahwa strategi implementasi Perbup ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pendataan kebutuhan, penyusunan rencana alokasi, koordinasi dengan produsen, hingga distribusi ke tingkat pengecer. Dinas juga melakukan sosialisasi rutin sebelum musim tanam untuk memastikan seluruh pihak memahami prosedur yang berlaku. *“Perencanaan distribusi pupuk itu sebenarnya panjang prosesnya. Kami mulai dari pengumpulan data di tingkat kelompok tani, lalu diverifikasi penyuluh, dan baru naik ke kami. Setelah itu kami tentukan alokasi per kecamatan dan desa. Setiap tahun strateginya selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya saat kebutuhan meningkat, kami usulkan penambahan alokasi, meskipun tidak selalu disetujui pusat.”* (Staff Dinas Pertanian).

Dinas menilai SDM yang tersedia sudah cukup memadai, namun tantangan muncul saat musim tanam tiba dimana volume pekerjaan jauh meningkat. Para penyuluh lapang sering kali harus menangani banyak kelompok tani sekaligus, sehingga tingkat efektivitas kinerja sedikit menurun. Dari aspek anggaran, Dinas menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan untuk pengawasan, administrasi, dan

koordinasi berasal dari APBD. Meski cukup, namun anggaran tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan yang terlalu intens ke seluruh desa secara bersamaan. *“Kalau dari sisi jumlah SDM sebenarnya cukup, tapi penyebarannya tidak merata. Ada kecamatan yang hanya punya satu penyuluh, tapi harus mendampingi banyak kelompok tani. Jadi saat musim tanam, mereka sering kewalahan. Sedangkan dari sisi anggaran, kami memang ada alokasi dari APBD, tapi tidak bisa terlalu sering turun ke lapangan karena keterbatasan biaya operasional.”* (Staff Dinas Pertanian).

Dinas menjelaskan bahwa pengisian RDKK dilakukan berjenjang mulai dari anggota kelompok, ketua kelompok, penyuluh hingga diverifikasi oleh Dinas. Proses verifikasi menjadi penting untuk mencegah data ganda, lahan fiktif, atau ketidaksesuaian kebutuhan. Mereka juga menekankan bahwa penyusunan RDKK dilakukan berbasis NIK, sehingga transparansi lebih terjaga. Namun, permasalahan tetap muncul seperti petani yang terlambat menyerahkan data, atau perubahan luas lahan yang tidak segera dilaporkan. *“Dalam verifikasi RDKK, kami sering menemukan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lahan sebenarnya. Misalnya ada petani yang mengaku punya lahan satu hektare padahal hanya setengahnya. Itu harus kami koreksi. Kadang prosesnya lama karena menunggu revisi dari kelompok tani. Tapi verifikasi ini penting untuk memastikan pupuk benar-benar sampai ke yang berhak.”* (Staff Dinas Pertanian).

Secara umum, sarana dan prasarana di tingkat kabupaten dinilai cukup memadai untuk pelaksanaan kebijakan. Namun di tingkat lapangan, terutama wilayah yang jauh dari pusat kecamatan, beberapa kendala ditemukan seperti kurangnya kendaraan operasional, keterbatasan gudang penyimpanan, serta jarak tempuh yang cukup jauh ke distributor. *“Sarana kami sudah lumayan lengkap, tapi kalau bicara di lapangan ya ada beberapa kendala. Misalnya penyuluh tidak punya motor dinas khusus, jadi mereka memakai kendaraan pribadi. Atau ada kelompok tani yang gudangnya belum standar sehingga penyimpanan pupuk tidak maksimal. Masalah-masalah seperti ini masih perlu diperbaiki ke depannya.”* (Staff Dinas Pertanian).

Ketua Gapoktan menyampaikan bahwa penyusunan RDKK dilakukan setiap tahun melalui pertemuan anggota. Proses ini meliputi pendataan luas lahan, jenis komoditas yang ditanam, serta jumlah pupuk yang dibutuhkan. Namun, proses ini tidak selalu lancar. Terkadang ada anggota yang terlambat menyerahkan data atau tidak memahami cara menghitung kebutuhan pupuk secara teknis. *“Biasanya kami kumpulkan anggota satu per satu. Mereka bawa data lahan, kemudian kami catat jumlah kebutuhannya. Tapi sering juga ada yang bingung menghitung kebutuhan pupuk. Jadi kami bantu menghitung. Tantangan lainnya, ada anggota yang telat melapor sehingga kami harus revisi data berkali-kali sebelum diserahkan ke penyuluh.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Ketua Gapoktan mengakui bahwa kuota pupuk subsidi yang diterima kelompok sering lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil petani. Penyebabnya antara lain keterbatasan alokasi kabupaten dan tingginya kebutuhan saat musim tanam tertentu. *“Kami sebenarnya butuh pupuk lebih banyak, tapi alokasinya tidak pernah penuh. Contohnya, kalau total kebutuhan kelompok 10 ton, yang turun hanya 6–7 ton. Jadi harus dibagi secara ketat. Kadang ada anggota yang tidak puas, tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena semuanya mengikuti alokasi dari pusat.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Ada juga kendala muncul karena data lahan dan anggota kelompok tani tidak selalu diperbarui secara akurat. Hal ini berdampak pada perbedaan antara kebutuhan pupuk yang diusulkan dan realisasi di lapangan. *“Kadang data lahan belum diperbarui. Ada petani yang sudah tidak aktif tapi masih terdaftar di RDKK, sebaliknya ada petani baru belum masuk data,”* (Penyuluh pertanian lapangan).

Ketua Gapoktan menilai bahwa penyuluh pertanian memberikan pendampingan yang cukup intens terutama saat penyusunan RDKK. Penyuluh membantu memverifikasi data anggota agar sesuai dengan standar. *“Penyuluh selalu mendampingi kami setiap kali menyusun RDKK. Mereka juga mengecek satu per satu apakah luas lahan sesuai kenyataan atau tidak. Kalau ada petani yang baru menggarap lahan, mereka minta surat keterangan dari desa supaya data valid.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Kendala paling sering muncul adalah keterlambatan data dari anggota dan perubahan kondisi lahan. *“Kendalanya itu biasanya dari anggota sendiri. Ada yang tiba-tiba menambah lahan, tapi tidak melaporkan. Atau kadang data yang diberikan tidak lengkap, sehingga harus bolak-balik revisi. Ini yang membuat proses penyusunan RDKK lama.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Anggota kelompok tani mendapatkan pupuk melalui pengecer resmi berdasarkan jatah yang disusun ketua kelompok. Mereka wajib membawa KTP dan kartu kelompok saat pengambilan. *“Kami tidak bisa membeli pupuk seenaknya. Harus pakai RDKK dan ambilnya lewat kelompok. Kalau nama tidak masuk daftar ya tidak bisa dapat. Jadi semua harus sesuai aturan.”* (Anggota Kelompok Tani).

Sebagian besar petani menyatakan bahwa jumlah pupuk subsidi yang diterima tidak memenuhi total kebutuhan lahan mereka, sehingga mereka harus membeli pupuk nonsubsidi sebagai tambahan. *“Kadang saya butuh dua kuintal untuk musim tanam, tapi yang dapat cuma satu kuintal. Kekurangannya terpaksa beli pupuk biasa yang harganya mahal. Tapi ya bagaimana lagi, kami ikut aturan.”* (Anggota Kelompok Tani).

Petani merasa prosedur pengajuan pupuk cukup mudah selama mereka aktif berkomunikasi dengan ketua kelompok. *“Kalau rajin lapor ke ketua kelompok, semuanya mudah. Yang sulit itu kalau kita tidak aktif. Data tidak masuk, akhirnya tidak dapat jatah pupuk. Jadi harus sering koordinasi.”* (Anggota Kelompok Tani).

Pelayanan dari pengecer dinilai cukup baik, meskipun sering kali stok datang terlambat dari pusat. *“Pengecer sebenarnya baik, selalu melayani sesuai giliran. Tapi kalau pupuknya telat datang dari pabrik, ya kami juga ikut telat dapat. Itu yang kadang bikin kami khawatir kalau sudah dekat masa tanam.”* (Anggota Kelompok Tani).

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan kios pupuk lengkap (KPL) sudah mencukupi, tetapi beberapa wilayah pinggiran masih kesulitan akses karena jarak dari gudang distributor cukup jauh. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran pupuk ke tingkat petani. Sementara itu, distributor dan pengecer mengaku bahwa pasokan pupuk dari produsen (PT Petrokimia Gresik) sering terlambat datang, terutama menjelang musim tanam serentak. *“Kami hanya bisa menyalurkan sesuai pasokan dari atas. Kadang jatah turun terlambat, akhirnya petani menunggu lama,”* (Distributor pupuk bersubsidi).

Pasokan dari produsen sering tidak sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga distribusi ke pengecer ikut terhambat. *“Kebutuhan di desa-desa itu besar, tapi pasokan dari atas terbatas. Jadi yang kami salurkan juga mengikuti jumlah yang kami terima. Kadang petani marah karena jatahnya sedikit, padahal bukan kami yang menentukan.”* (Distributor pupuk bersubsidi).

Distributor harus mengisi banyak dokumen setiap kali menyalurkan pupuk. *“Administrasinya memang lebih ketat sekarang. Setiap kantong pupuk yang keluar harus dicatat namanya, NIK-nya, berapa jumlahnya. Laporan juga harus disetor setiap bulan. Capek, tapi ya memang aturan harus ditaati.”* (Distributor pupuk bersubsidi).

Kendala terjadi terutama saat musim hujan atau ketika pasokan datang dalam jumlah besar dan mendadak. *“Kalau hujan dan jalan licin, truk tidak bisa masuk ke beberapa desa. Selain itu, kadang pupuk datang di waktu yang tidak pasti, sehingga kami sering kewalahan membagi dalam waktu singkat.”* (Distributor pupuk bersubsidi).

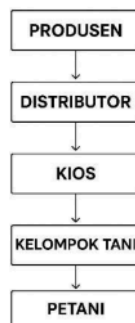
Dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, petani penerima menjelaskan bahwa pengajuan dilakukan melalui ketua kelompok, sementara petani non-penerima biasanya tidak terdaftar karena keterlambatan administrasi atau belum menjadi anggota kelompok. Penyuluh juga dinilai sangat membantu dalam memahami syarat dan prosedur. *“Penyuluh biasanya ke desa, menjelaskan tentang cara mengisi data dan mengurus RDKK. Jadi kami tidak bingung.”* (Petani penerima pupuk subsidi).

Namun terkait kesediaan pupuk, baik penerima maupun non-penerima menyampaikan bahwa pupuk subsidi jarang mencukupi total kebutuhan. *“Subsidi itu membantu, tapi belum cukup. Kalau kebutuhannya besar, tetap harus beli tambahan di luar.”* (Petani penerima dan non-penerima). Ada juga kendala yang dihadapi seperti, stok tidak stabil, datangnya tidak menentu, dan kuota lebih kecil dari kebutuhan lahan. *“Kendalanya paling sering stok telat. Kalau kami telat pupuk tanaman, hasil panen bisa turun. Itu yang paling kami khawatirkan.”* (Petani penerima pupuk subsidi).

Dari sisi anggaran, tidak ada kendala berarti karena subsidi ditanggung pemerintah pusat. Namun, pengawasan terhadap kuota pupuk di tingkat kelompok masih lemah, sehingga rawan penyelewengan. Secara keseluruhan, aspek input sudah berjalan sesuai pedoman, namun belum optimal karena lemahnya validasi data RDKK, kurangnya tenaga penyuluh, dan keterbatasan sarana distribusi.

C. Komponen Process (Proses)

Pada tahap proses, penelitian menemukan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri sudah memiliki alur baku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala di lapangan.



Gambar 4. 3 Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dinas menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga kelompok tani. Koordinasi paling intens terjadi menjelang musim tanam karena kebutuhan pupuk meningkat signifikan. Dinas menyampaikan bahwa mereka rutin mengadakan rapat koordinasi dengan distributor untuk memastikan kesiapan gudang dan stok. Selain itu, penyuluh pertanian menjadi penghubung utama antara Dinas dan kelompok tani.

Menurut Dinas, pelaksanaan distribusi pupuk sudah mengikuti alur resmi. Dinas menekankan bahwa sistem ini dibuat untuk memastikan alur pupuk bisa dilacak. Namun, di lapangan masih terjadi kendala seperti ketidaksesuaian data atau keterlambatan pengiriman. *“Secara prosedur semua sudah jelas alurnya. Tapi kadang-kadang di lapangan ada saja keterlambatan. Misalnya, jadwal pengiriman dari produsen mundur satu atau dua hari. Itu langsung terasa dampaknya sampai petani.”* (Staff Dinas pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas juga mengungkapkan beberapa hambatan utama, yaitu keterlambatan stok dari produsen, pembaruan data RDKK yang tidak tepat waktu, beban kerja penyuluh yang terlalu besar, pengawasan yang belum merata. Pengawasan sudah dilakukan melalui monitoring langsung dan pengecekan laporan distributor serta pengecer. Namun, keterbatasan SDM membuat pengawasan belum optimal.

Pada tahap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, ketua kelompok menjelaskan bahwa pupuk disalurkan kepada anggota berdasarkan daftar RDKK. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pertanian, distributor, dan kelompok tani belum berjalan maksimal. Kadang informasi mengenai waktu penyaluran pupuk tidak tersampaikan dengan cepat, sehingga terjadi penundaan penebusan pupuk oleh petani. *“Kadang pupuk sudah sampai di kios tapi petani belum tahu. Sebaliknya, petani datang tapi pupuk belum datang dari distributor,”* (Ketua kelompok tani).

Ketua juga menegaskan terkait pupuk yang datang lebih sedikit dari permintaan atau datang tidak sesuai waktu. *“Paling sering itu pupuknya telat. Misalnya harusnya datang awal bulan, tapi datangnya akhir bulan. Itu bikin petani panik karena mau tanam tidak bisa nunggu.”* (Ketua kelompok tani).

Dari sisi pengawasan, Dinas Pertanian telah melakukan monitoring berkala, namun keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak merata

di semua kecamatan. *“Penyuluh pertanian lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian hanya satu orang dalam satu kecamatan,”* (Ketua Kelompok Tani). Selain itu, transparansi data penerima pupuk di tingkat desa masih rendah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar petani. *“Pupuk Subsidi semua dapat, yang tidak dapat itu yang tidak mengajukan RDKK. Untuk syarat pengajuan RDKK yaitu fotocopy KTP, KK, dan pipil pajak sawah”* (Penyuluh pertanian lapangan).

Dalam prosesnya, petani menjelaskan bahwa proses penyaluran berjalan melalui ketua kelompok. Mereka datang pada hari yang sudah ditentukan untuk mengambil pupuk. Petani juga menilai bahwa ketepatan distribusi masih menjadi masalah utama. *“Sering tidak pas waktunya. Kadang sudah mau tanam tapi pupuk belum ada. Kuotanya juga sering kurang dari kebutuhan.”* (Anggota Kelompok Tani).

Petani menambahkan hambatan terbesar nya yaitu keterlambatan distribusi, kuota kecil, serta antrian panjang saat pembagian. *“Antrean panjang itu hal biasa. Tapi kalau telat datang, itu yang bikin pusing. Soalnya pemupukan tidak bisa sembarangan waktu.”* (Anggota Kelompok Tani).

Dalam proses komunikasi dinilai cukup baik, melalui pertemuan rutin. *“Kalau ada masalah biasanya kami langsung tanya ke ketua atau penyuluh. Mereka cepat jawab, cuma kadang tidak bisa langsung memberi solusi karena tergantung atasan.”* (Anggota Kelompok Tani).

Dalam mekanisme pendistribusian pupuk, distributor menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan produsen. Setelah pupuk tiba di gudang, mereka langsung menyalurkan ke pengecer (kios). *“Pupuk dari produsen masuk ke gudang kami. Setelah itu kami salurkan ke pengecer berdasarkan alokasi. Pengecer lah yang kemudian membagikan ke kelompok tani.”* (Distributor pupuk). Distributor juga menjelaskan bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan Dinas jika terjadi perubahan alokasi atau pengiriman. *“Kalau ada perubahan jadwal atau ada kekurangan pasokan, kami langsung lapor ke Dinas. Soalnya nanti yang kena komplain itu pengecer dan kelompok.”* (Distributor pupuk).

Namun, Hambatan paling sering adalah cuaca buruk, keterlambatan dari produsen, atau kesalahan data RDKK. Distributor juga harus melaporkan seluruh transaksi secara berkala kepada Dinas. *“Setiap keluar pupuk harus ada bukti transaksi dan tanda tangan. Semua itu kami laporkan. Kalau ada penyaluran yang tidak sesuai, risikonya besar bagi kami.”* (Distributor pupuk).

Dalam prosesnya, RDKK sistemnya pengajuan ke kelompok tani lalu diserahkan ke ketua Gapoktan dan disetor ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Meskipun sudah terdata dan tertata, masih terdapat penyelewengan di lapangan. *“Saya sudah mengajukan RDKK, namun KTP saya tidak valid. Padahal dalam syarat yang tertera maksimal luas lahan 2 hektar untuk satu nama, sedangkan luas lahan saya tidak sampai 2 hektar,”* (Petani Non-penerima). *“KTP tidak valid sebenarnya sudah kami ajukan tapi tidak masuk sistem RDKK, mungkin ada nama kembar yang lebih dari 2 hektar atau misalkan pengajuan lebih dari 2 hektar,”* (Ketua Gapoktan).

Namun, masih ditemukan beberapa penyelewengan seperti adanya beberapa petani yang mendapatkan pupuk subsidi padahal sawahnya lebih dari 2 hektar. Hal itu terjadi karena petani tersebut meminjam KTP/nama petani lain supaya jatah pupuk nya bertambah dan kondisi tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Anggota kelompok tani juga mengeluhkan bahwa pupuk yang diterima sering tidak sesuai jumlah kebutuhan lahan dan terkadang distribusinya tidak tepat waktu, khususnya saat musim hujan dan masa tanam serentak. *“Kami biasanya dapat pupuk terlambat, padahal waktu tanam sudah jalan. Akhirnya harus beli pupuk nonsubsidi dulu,”* (Petani penerima pupuk subsidi).

Meskipun begitu, komunikasi internal antara kelompok tani dan penyuluh sudah cukup baik, dan para petani tetap aktif menyusun RDKK setiap tahun sebagai bentuk partisipasi mereka. Petani menilai peran kelompok tani sangat besar dalam kelancaran pembagian pupuk. *“Turut serta aktif dalam kelompok itu kuncinya. Kalau bukan karena pertemuan rutin, kami tidak tahu apa-apa soal penyuluhan dan jadwal pupuk.”* (Petani penerima pupuk subsidi).

D. Komponen Product (Produk)

Komponen produk menilai hasil dan dampak kebijakan terhadap petani dan sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi berdampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi.

Dinas menyampaikan bahwa kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pupuk subsidi. Dengan adanya sistem pendataan berbasis RDKK, distribusi menjadi lebih teratur dibandingkan

sebelumnya. *“Sejak menggunakan RDKK yang terintegrasi, ketersediaan pupuk jauh lebih terkontrol.”* (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas juga menilai produktivitas petani cenderung meningkat terutama bagi penerima pupuk subsidi karena biaya produksi lebih rendah sehingga petani dapat menjaga tingkat pemupukan yang optimal. *“Produktivitas memang meningkat, terutama pada komoditas seperti padi dan jagung. Pupuk subsidi membantu petani mempertahankan dosis pupuk yang ideal, sehingga hasil panen stabil bahkan cenderung naik.”* (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Menurut Dinas, keberhasilan program dapat dilihat dari meningkatnya keteraturan distribusi dan menurunnya laporan penyalahgunaan pupuk. *“Jika dibandingkan sebelum Perbup ini ada, sekarang laporan penyimpangan jauh berkurang. Monitoring bisa dilakukan lebih mudah karena datanya jelas dan bisa dilacak.”* (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas menyarankan peningkatan akurasi RDKK serta penambahan alokasi pupuk terutama pada musim tanam tertentu yang membutuhkan pupuk lebih banyak. *“Yang perlu diperbaiki itu pendataan. Masih sering kami menerima RDKK yang terlambat atau tidak akurat. Selain itu, kami harap alokasi bisa ditambah, karena kebutuhan petani semakin meningkat tiap tahun.”* (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Selanjutnya, Ketua Gapoktan menjelaskan bahwa pupuk subsidi sangat berdampak pada produksi tanam. Pupuk yang tersedia tepat waktu dapat meningkatkan kualitas tanaman dan kuantitas hasil panen. Ketua menyampaikan bahwa pupuk subsidi secara signifikan meringankan biaya produksi, terutama bagi petani kecil. *“Pupuk subsidi ini sangat membantu. Kalau tidak pakai subsidi, biaya produksi bisa naik dua kali lipat. Petani kecil pasti berat. Dengan subsidi, setidaknya mereka masih bisa untung.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Ketua juga menilai tingkat kepuasan bervariasi. Sebagian besar puas dengan mekanisme pembagian, namun kuota yang kecil membuat masih ada keluhan. Saran utama adalah penambahan kuota pupuk serta perbaikan proses pengiriman agar tidak terjadi keterlambatan. *“Kalau bisa kuotanya ditambah. Kami juga berharap tidak ada lagi keterlambatan dari pabrik. Itu yang paling sering bikin masalah.”* (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Dari sisi produktivitas, para petani di Desa Ketawang merasakan peningkatan hasil panen, terutama pada komoditas jagung dan padi. Namun, sebagian petani mengeluhkan bahwa ketidakseimbangan jenis pupuk (terlalu banyak Urea, sedikit NPK) menyebabkan tanah menjadi keras dan menurunkan kualitas hasil pada musim berikutnya. *“Kami terlalu sering pakai Urea karena NPK susah didapat. Lama-lama tanahnya keras, hasilnya menurun,”* (Anggota Kelompok Tani).

Pupuk subsidi secara langsung mengurangi beban biaya, terutama bagi petani dengan lahan kecil. *“Biaya pupuk itu paling besar. Kalau dapat subsidi, biaya bisa turun banyak. Kalau tidak, modal bertani itu kadang malah rugi.”* (Anggota Kelompok Tani). Mereka juga mengatakan terkait kepuasan yang bervariasi, namun mayoritas petani merasa terbantu. *“Kami terbantu sekali, tapi kami berharap jumlah pupuk bisa lebih banyak. Soalnya kebutuhan lahan tidak selalu sama setiap musim.”* (Anggota Kelompok Tani). Mereka berharap kuota ditambah serta distribusi dipercepat.

Menurut distributor mengenai kebijakan pupuk bersubsidi, pihak distributor mengakui bahwa kebijakan Perbup membuat alur distribusi lebih tertata dan meminimalkan penyelewengan. *“Sekarang distribusi lebih jelas, tidak ada lagi petani yang membeli tanpa nama. Itu bagus untuk mencegah penyalahgunaan.”* (Distributor pupuk).

Distributor juga menyampaikan bahwa sebagian besar petani merasa puas dengan pelayanan, meskipun ada keluhan ketika stok terlambat. Distributor menilai kebijakan cukup efektif dalam mengurangi kelangkaan pupuk, meskipun masalah masih muncul ketika pasokan dari produsen tidak stabil. *“Dulu pupuk langka sekali, tapi sekarang sudah jarang. Kalau pun terjadi, biasanya karena pasokan telat, bukan karena kami salah menyalurkan.”* (Distributor pupuk). Distributor berharap pendataan RDKK lebih tertib dan pasokan dari produsen lebih stabil.

Dari sisi petani penerima, mereka mampu menekan pengeluaran hingga 20–30% dibanding sebelum ada program subsidi. *“Kalau beli pupuk nonsubsidi satu sak bisa 200 ribu lebih, tapi kalau subsidi cuma 120 ribu, jelas membantu,”* (Petani penerima). Namun, bagi petani non-penerima menyatakan bahwa mereka terpaksa mengurangi dosis pemupukan atau membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tinggi. Hal ini secara langsung berdampak pada menurunnya hasil panen. *“Karena nama saya tidak masuk RDKK, saya harus beli pupuk non-subsidi. Jujur saja, saya terpaksa pakai sedikit-sedikit. Akhirnya panennya juga turun.”* (Petani non-penerima).

Mereka merasakan perubahan pendapatan yang cukup signifikan. Biaya produksi lebih ringan karena sebagian kebutuhan pupuk ditanggung pemerintah. Namun, Petani non-penerima mengaku pendapatan mereka jauh lebih rendah. Mereka sering mengalami kerugian terutama saat musim tanam yang kurang menguntungkan. Mayoritas petani penerima menyampaikan bahwa mereka puas dengan adanya pupuk subsidi karena langsung terasa manfaat ekonominya. Namun, sebagian besar tetap menyampaikan keluhan terkait jumlah kuota yang lebih kecil daripada kebutuhan. Namun, Petani non-penerima menyampaikan ketidakpuasan karena merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pendataan. Mereka berharap bisa ikut terdaftar dalam RDKK agar dapat mengakses pupuk subsidi.

Petani penerima mengaku lebih bersemangat bertani karena biaya produksi lebih ringan dan hasil lebih terjamin. Pupuk subsidi dianggap sebagai “jaminan keberlanjutan” usaha pertanian mereka. *“Subsidi itu yang membuat kami tetap bertahan jadi petani.”* (Petani penerima). Sedangkan Petani non-penerima merasa motivasi mereka menurun karena beban biaya produksi jauh lebih tinggi. *“Yang membuat kami bertahan hanya harapan bahwa tahun berikutnya masuk RDKK.”* (Petani non-penerima).

Dari sisi sosial, kebijakan ini mampu meningkatkan semangat petani untuk terus bertani karena merasa diperhatikan oleh pemerintah. Namun, aspek keadilan dan pemerataan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah, karena masih ada petani yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh subsidi. *“Bagi yang dapat subsidi, jelas semangat, tapi yang tidak dapat justru kecewa. Harusnya pemerintah perbarui datanya,”* (Petani non-penerima).

Saran yang paling banyak disampaikan terkait kelancaran distribusi pupuk. *“Kalau bisa, pupuk jangan telat. Kita itu bekerja mengikuti musim, bukan menunggu pupuk.”* (Petani penerima). Sementara petani non penerima mengatakan *“Yang penting datanya harus benar. Jangan sampai petani kecil tidak masuk daftar lagi.”* (Petani non-penerima).

4.2 Pembahasan

Bagian pembahasan ini menjelaskan temuan penelitian berdasarkan ⁴⁶ hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Bupati

Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri”.

Analisis dalam pembahasan ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik yang memandang kebijakan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan Model Evaluasi CIPP :

A. Komponen Context (Konteks)

Komponen context dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai latar belakang, kebutuhan, dan relevansi kebijakan terhadap kondisi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjawab kebutuhan petani terhadap ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, sekaligus mengatasi permasalahan kelangkaan dan penyelewengan distribusi pupuk yang sering terjadi sebelum adanya kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian dan kelompok tani, diketahui bahwa kebijakan ini dianggap masih relevan dan dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Kediri, terutama untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul persoalan seperti ketidaksesuaian data penerima pupuk, perbedaan kuota antar kelompok, serta belum meratanya akses pupuk di semua wilayah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 sudah tepat secara tujuan dan kebutuhan, tetapi masih memerlukan pembaruan sistem agar lebih adaptif dengan kondisi terkini di lapangan, terutama dalam hal pendataan lahan dan petani penerima subsidi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Valeriana Darwis dan Supriyati (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk secara umum relevan, namun efektivitasnya masih terganggu oleh lemahnya sistem pendataan dan distribusi. Artinya, dari sisi konteks, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat tani, tetapi perlu penyesuaian agar tetap tepat sasaran.

Penelitian Darwis & Supriyati juga menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya kesesuaian context dan input sebagai dasar

efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Penelitian mereka menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus didasari kebutuhan dan relevansi (context), efektivitas sangat bergantung pada kualitas data, SDM, dan sarana (input).

Hal ini selaras dengan penelitian ini yang juga menemukan bahwa Perbup No. 28 Tahun 2014 masih relevan dengan kebutuhan petani (context), namun masih terdapat masalah pada akurasi data RDKK dan ketersediaan SDM penyuluh (input). Persamaannya sama-sama berangkat dari prinsip bahwa kebijakan hanya efektif bila konteks kebutuhannya tepat dan input pelaksanaannya kuat dan sejalan dengan teori dasar model CIPP.

³⁷ B. Komponen Input (Masukan)

Komponen input menilai sumber daya, strategi, dan sarana pendukung yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri dilakukan melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian. Namun, beberapa informan menyatakan bahwa data RDKK tidak selalu mutakhir, karena masih terdapat nama-nama petani yang sudah tidak aktif, serta petani baru yang belum terdaftar.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia penyuluh pertanian dinilai masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok tani belum maksimal. Dari sisi sarana dan prasarana, jumlah kios pupuk lengkap (KPL) sudah mencukupi, namun jarak gudang distributor dengan wilayah kelompok tani tertentu cukup jauh, menyebabkan keterlambatan distribusi pada masa tanam tertentu.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kelemahan pada aspek input ini menunjukkan bahwa perencanaan teknis dan dukungan sumber daya belum optimal untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ragimun, Makmun, dan Sigit Setiawan (2020) yang menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan subsidi pupuk sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan peran aktif aparat pertanian dalam pembinaan petani. Dengan demikian, untuk memperbaiki aspek input, perlu adanya validasi data penerima pupuk secara berkala, peningkatan kapasitas SDM pertanian, dan penguatan sistem distribusi berbasis data digital agar penyaluran pupuk lebih efisien dan tepat sasaran.

Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan subsidi pupuk memerlukan perhatian pada komponen proses, terutama koordinasi, mekanisme penyaluran, dan pengawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa komponen process sangat menentukan efektivitas kebijakan, sesuai teori CIPP bahwa process evaluation dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan menilai apakah mekanisme pelaksanaan sudah sejalan dengan desain kebijakan. Persamaannya sama-sama menempatkan process evaluation sebagai penentu efektif tidaknya kebijakan, sesuai teori CIPP dan teori evaluasi kebijakan publik.

C. Komponen Process (Proses)

Komponen process berfokus pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, meliputi mekanisme distribusi, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan selama proses penyaluran pupuk berlangsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi telah mengikuti alur resmi yang diatur pemerintah, yaitu dari produsen ke distributor lalu pengecer/kios ke kelompok tani dan diterima oleh petani. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan pengiriman, ketidaktepatan jumlah, dan perbedaan informasi antara pihak Dinas, distributor, dan kelompok tani.

Selain itu, pengawasan di tingkat bawah masih terbatas karena jumlah penyuluh pertanian yang minim serta kurangnya transparansi data penerima di tingkat kelompok. Kondisi ini menimbulkan potensi kecemburuan sosial antar petani, terutama antara petani penerima dan non-penerima subsidi.

Dari sudut pandang evaluasi kebijakan, permasalahan ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan belum sepenuhnya efektif dan efisien, meskipun prosedur administrasi sudah tersedia. Proses distribusi pupuk di lapangan masih memerlukan sinkronisasi antar lembaga dan penegakan sistem pengawasan yang lebih kuat, agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi seluruh petani.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ikham Kholis dan Khasan Setiaji (2020) yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, koordinasi antar aktor dan efektivitas komunikasi menjadi faktor penting agar penyaluran pupuk tepat waktu dan sesuai sasaran. Dengan demikian, aspek process dalam evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih terhambat oleh koordinasi, pengawasan, dan perbedaan data antara instansi terkait.

Penelitian mereka, meskipun berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi pada petani padi, menggunakan kerangka evaluasi yang serupa, yakni efektivitas kebijakan diukur melalui input, proses distribusi, serta hasil (product) berupa dampak terhadap petani. Perspektif ini sejalan dengan model CIPP yang digunakan dalam penelitian ini. Keduanya menilai efektivitas kebijakan melalui kecukupan data dan perencanaan (input), kelancaran proses penyaluran (process), dan hasil berupa produktivitas petani (product). Persamaannya sama-sama memaknai efektivitas kebijakan melalui kerangka evaluasi yang terpadu dan berorientasi pada dampak.

D. Komponen Product (Produk)

Komponen product digunakan untuk menilai hasil, dampak, dan manfaat kebijakan terhadap masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas petani menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi memberikan manfaat nyata dalam meringankan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Sebelum adanya subsidi, petani harus membeli pupuk dengan harga tinggi, sementara setelah kebijakan diberlakukan, biaya pemupukan dapat ditekan hingga 20–30%.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak yang belum sesuai harapan, yaitu ketimpangan distribusi antara petani penerima dan non-penerima subsidi, serta ketidakseimbangan jenis pupuk (dominan Urea, sedikit NPK) yang menyebabkan penurunan kualitas tanah dalam jangka panjang.

Dari sisi sosial, kebijakan ini berdampak positif karena meningkatkan semangat petani untuk tetap bertani. Tetapi dari sisi keadilan, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan, karena masih ada kelompok tani kecil yang tidak terakomodasi dalam daftar penerima pupuk.

Menurut teori evaluasi kebijakan publik, evaluasi hasil kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target output (seperti jumlah pupuk tersalurkan), tetapi juga harus mempertimbangkan outcome (dampak bagi masyarakat) dan sustainability (keberlanjutan). Dengan demikian, meskipun kebijakan ini telah berhasil meningkatkan produktivitas, perlu upaya lanjutan agar hasil kebijakan berkelanjutan dan merata bagi semua petani.

Penemuan ini juga memperkuat hasil penelitian Maman, Aminudin, dan Novriana (2011) yang menegaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk mampu

meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi perlu dikombinasikan dengan kebijakan penggunaan pupuk berimbang agar tanah tetap subur dalam jangka panjang.

Penelitian tersebut menggunakan landasan teori evaluasi hasil kebijakan yang menilai produktivitas petani sebagai ukuran keberhasilan (product evaluation).

Mereka menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak berhenti pada output administratif, tetapi perlu mengukur outcome berupa peningkatan hasil panen, efisiensi biaya, kesejahteraan petani. Penelitian ini juga menerapkan prinsip teori tersebut, karena menilai efektivitas kebijakan melalui peningkatan produktivitas, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan penggunaan pupuk. Persamaannya sama-sama berpijak pada teori evaluasi produk dalam model CIPP yang menilai hasil kebijakan melalui outcome nyata bagi masyarakat.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri”, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari aspek Context (Konteks):
Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang terjangkau serta mencegah kelangkaan pupuk di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini dinilai masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Kediri karena mampu membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah. Namun demikian, terdapat kendala dalam aspek pemerataan penerima pupuk bersubsidi, di mana sebagian petani kecil belum sepenuhnya terakomodasi dalam daftar penerima manfaat.
2. Dari aspek Input (Masukan):
Kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan sistem perencanaan kebijakan sudah tersedia, namun belum sepenuhnya optimal. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih menghadapi kendala pada akurasi data petani dan luas lahan, sementara jumlah penyuluh pertanian dan pengawasan lapangan masih terbatas. Selain itu, sarana distribusi pupuk di beberapa wilayah belum merata, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk pada waktu tanam tertentu.
3. Dari aspek Process (Proses):
Mekanisme pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk telah mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu melalui jalur produsen – distributor – pengecer/kios – kelompok tani – petani. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ketidaktepatan waktu distribusi, perbedaan informasi antar pihak, serta lemahnya koordinasi dan transparansi data. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan sudah berjalan, tetapi belum efektif sepenuhnya dalam mencapai prinsip enam tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat sasaran).

4. Dari aspek Prod⁵⁶ (Produk):

Hasil kebijakan menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi petani. Petani penerima subsidi mampu menekan biaya pemupukan dan meningkatkan hasil pertanian dibanding sebelum kebijakan diterapkan. Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam pemerataan penerimaan pupuk dan ketidakseimbangan penggunaan jenis pupuk (terlalu dominan Urea) yang dapat memengaruhi kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi petani, tetapi belum optimal secara menyeluruh. Aspek yang masih perlu diperbaiki meliputi pembaruan data penerima subsidi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pemerataan distribusi pupuk di tingkat desa agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

34

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data RDKK secara berkala dengan melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani agar data penerima pupuk subsidi benar-benar akurat dan mutakhir.
2. Memanfaatkan teknologi digitalisasi pendataan dan pelaporan distribusi pupuk untuk mempermudah pengawasan dan mempercepat proses verifikasi data RDKK.
3. Melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan transparan, dengan melibatkan perangkat desa dan kelompok tani agar penyaluran pupuk lebih akuntabel dan menghindari penyelewengan.
4. Meninjau kembali proporsi jenis pupuk bersubsidi, agar tidak hanya berfokus pada Urea tetapi juga memperhatikan kebutuhan pupuk berimbang seperti NPK dan organik.

19

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi serta memperkuat sistem evaluasi kebijakan publik di sektor pertanian agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	2%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
3	nusantara7.com Internet Source	1%
4	research-report.umm.ac.id Internet Source	1%
5	lampungmediaonline.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.binadarma.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
10	psp.pertanian.go.id Internet Source	1%
11	dpkp.brebeskab.go.id Internet Source	<1%

12	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
13	repository.stain-madina.ac.id Internet Source	<1 %
14	jsp.fp.unila.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
17	Mohammad Arridho Nur Amin, Tubagus Abdulloh Khilmi. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Growth Terhadap Kinerja", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2023 Publication	<1 %
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
19	id.scribd.com Internet Source	<1 %
20	puslit.dpr.go.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
23	alandta.blogspot.com Internet Source	<1 %

24	disbun.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
25	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
29	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
30	www.ejournal.polbangtanmedan.ac.id Internet Source	<1 %
31	123dok.com Internet Source	<1 %
32	repository.unigoro.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
34	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
37	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %

38	djpb.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
39	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
41	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.perumperindo.co.id Internet Source	<1 %
43	adoc.pub Internet Source	<1 %
44	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
45	issuu.com Internet Source	<1 %
46	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
47	kamuslengkap.com Internet Source	<1 %
48	repository.upm.ac.id Internet Source	<1 %
49	troboslivestock.com Internet Source	<1 %
50	www.balipost.co.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %

52	id.123dok.com Internet Source	<1 %
53	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
54	Abdul Aziz, Pudji Muljono, Irsal Las, Retno Sri Hartati Mulyandari. "ANALISIS BENTUK KOMUNIKASI ANTAR PIHAK DALAM PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM TERPADU DI KEMENTERIAN PERTANIAN", Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 2020 Publication	<1 %
55	Siti Faridatul Gufroniah, Sugiono Sugiono. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022 Publication	<1 %
56	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
57	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
58	kabarsbi.com Internet Source	<1 %
59	radarjember.jawapos.com Internet Source	<1 %
60	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %

61	www.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
62	Nabilla Gita Ratrifa, Joko Sutrisno, Setyowati -. "Analisis Distribusi Pupuk di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara", Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 2023 Publication	<1 %
63	Saydatul Atifa, Alfikri, Arnayulis. "Analysis Of The Implementation Of The Subsidized Fertilizer Program In Gapoktan Gurun Raya", JURNAL AGRIBISAINS, 2025 Publication	<1 %
64	ariagt018.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	blogabseaja.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	bostokosidoarjo.wordpress.com Internet Source	<1 %
67	cheesesweety.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	core.ac.uk Internet Source	<1 %
69	doaj.org Internet Source	<1 %
70	ejournal-nipamof.id Internet Source	<1 %
71	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %

72	Internet Source	<1 %
73	jima-emagri.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
74	publika.rmol.id Internet Source	<1 %
75	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
76	validnews.id Internet Source	<1 %
77	vdocuments.site Internet Source	<1 %
78	www.radarsampit.net Internet Source	<1 %
79	www.scribd.com Internet Source	<1 %
80	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
81	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On